

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin bertambah pesat seiring dengan perkembangan teknologi akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap instansi di Indonesia. Perubahan yang terjadi saat ini selalu terjadi secara terus menerus dan sulit untuk diperkirakan, instansi pemerintah harus mampu untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, agar instansi tersebut mampu mempertahankan keberlangsungan hidup.

Dalam era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sektor pemerintahan dituntut untuk terus berbenah dan berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam manajemen pemerintahan adalah pengelolaan barang dan persediaan, yang menjadi bagian integral dari proses pelayanan, khususnya di instansi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Balangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti pelayanan pembuatan KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Semua layanan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan barang dan perlengkapan yang memadai dan terkelola dengan baik.

Persediaan barang di lingkungan Disdukcapil mencakup berbagai jenis item, mulai dari blanko dokumen, tinta printer, formulir administrasi, hingga peralatan pendukung operasional lainnya. Ketepatan dalam pencatatan dan

pengelolaan persediaan sangat penting agar tidak terjadi kehabisan stok atau penumpukan barang yang tidak efisien. Pengelolaan persediaan yang tidak terorganisir dapat menghambat proses pelayanan, menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan dokumen, dan bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Sebelum adanya digitalisasi, pencatatan dan pengelolaan persediaan di Disdukcapil Kabupaten Balangan dilakukan secara manual menggunakan buku atau spreadsheet sederhana. Sistem manual ini memiliki banyak keterbatasan, seperti rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, sulitnya pemantauan stok secara real-time, serta keterbatasan dalam pembuatan laporan yang cepat dan akurat. Hal ini sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan persediaan dengan kondisi riil di lapangan (stok fisik), yang pada akhirnya menghambat efektivitas layanan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan mengembangkan dan mulai menerapkan Sistem Pencatatan Persediaan (SICAPER). SICAPER merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan, pengendalian, dan pelaporan barang persediaan secara elektronik. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dengan adanya SICAPER, seluruh proses keluar-masuk barang dapat dicatat secara otomatis dan sistematis. Sistem ini juga memungkinkan pejabat pengelola barang untuk memantau stok secara real-time, melakukan analisis

kebutuhan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban barang dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan sistem ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi dan penerapan e-government di seluruh lini pelayanan publik.

Namun demikian, penerapan sebuah sistem informasi tidak selalu berjalan mulus dan optimal. Banyak faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan sistem seperti kompetensi pengguna, ketersediaan infrastruktur pendukung, pelatihan, serta komitmen manajerial dalam implementasi sistem. Oleh karena itu, meskipun SICAPER telah digunakan dalam pengelolaan persediaan di Disdukcapil Kabupaten Balangan, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sistem ini efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan adalah:

1. Pengelolaan persediaan masih kurang efisien yang mana dalam pengelolaan persediaan barang tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi SICAPER atau dilakukan secara manual sehingga pencatatan yang dilakukan tidak terpusat pada aplikasi SICAPER, dan proses manual yang dilakukan sering terjadi kesalahan input jumlah barang yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara stok fisik dengan catatan. Laporan hasil monitoring tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 100 item barang persediaan, 50% data stok tidak sesuai antara catatan sistem dan stok fisik di gudang. (Sumber : *Pengelolaan Pencatatan Persediaan Barang, 2024*)

2. Kurangnya sumber daya manusia untuk pengelola SICAPER, dimana personel yang ditugaskan sebagai pengelola sistem sering kali belum memiliki keahlian teknis memadai dan kurang memahami logika sistem kerja SICAPER, seperti proses alur barang masuk-keluar, pencatatan stok minimum, atau pelaporan *real-time* dan Pelatihan yang diberikan bersifat singkat dan tidak mendalam, sering kali hanya satu kali sosialisasi tanpa pendampingan lanjutan sehingga yang berdampak pada tidak konsistennya pencatatan digital.
3. Minimnya monitoring dan evaluasi sistem, tidak ada pengawasan berkala dari tim pengelola aset atau inspektorat terhadap penggunaan SICAPER dimana serta tidak ada jadwal yang terstruktur dari tim pengelola aset maupun inspektorat daerah. Kegiatan pengawasan hanya dilakukan jika ada temuan, audit tahunan, atau permintaan khusus dan Laporan penggunaan SICAPER tidak pernah ditinjau secara berkala, baik dari segi kualitas data, frekuensi penggunaan, maupun ketepatan penggunaannya oleh petugas. Dari rekap laporan triwulan menunjukkan bahwa laporan barang yang disusun dengan SICAPER masih harus diperiksa ulang secara manual, karena sistem belum otomatis menghitung saldo barang tertentu.

(Sumber: Laporan Triwulan, 2025)

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Implementasi Sistem Pencatatan Persediaan (SICAPER) Dalam Mengelola Persediaan Barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan yaitu Implementasi Sistem Pencatatan Persediaan (SICAPER) Dalam Mengelola Persediaan Barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Maka peneliti memfokuskan menurut Menurut George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) implementasi yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumberdaya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Sistem Pencatatan Persediaan (SICAPER) Dalam Mengelola Persediaan Barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Sistem Pencatatan Persediaan (SICAPER) Dalam Mengelola Persediaan Barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Pencatatan Persediaan (SICAPER) Dalam Mengelola Persediaan Barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Pencatatan Persediaan (SICAPER) Dalam Mengelola Persediaan Barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam rangka Implementasi Sistem Pencatatan Persediaan (SICAPER) Dalam Mengelola Persediaan Barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.